

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri, 2013, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Konstitusi Press: Jakarta.
-, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
-, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
-, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
-, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Cet. 2, Setara Press, Malang.
-, 2006, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cet. II, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
-, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ball, Allan R., 1988, *Modern Politics and Government*, Mcmillan Education LTD, London.
- Brandt, Michele, dkk, 2011, *Constitution-making and Reforms Options for the Process*, Interpeace, Switzerland.



- Bruns, Gerald L. dalam Gregory Leyh, 2008, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Pratik*, terj. M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Bobbit, Phillip, 1984, *Constitutional Fate Theory of the Constitution*, Oxford University Press, New York.
- Budiardjo, Mariam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chemerinsky Erwin, 1987, *Intepreting the Constituion*, Praeger Publishers, New York.
- Dicey, Albert Venn, 1982, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Indianapolis: Liberty Fund.
- Dicey, A.V., 2008, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terj. Nurhadi, Nusamedia, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2018, *Filsafat Hukum: Studi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Depok.
- Falaakh, M. Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Faiz, Pan Mohamad dan M. Lutfi Chakim, 2020, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, Rajawali Pers, Depok.
- Faiz, Pan Mohamad dkk. (ed.), 2019, *Mahkota Mahkamah Konstitusi: Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok.
- Garner, Bryan A. dan Henry Campbell Black (ed.), 2004, *Black's law dictionary*, Thomson/West, St. Paul, MN.
- Harun, Refly, 2019, *Penafsiran Konstitusi: How to Intepret the Constitution*, Rajawali Pers, Depok.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.



- Isra, Saldi, 2020, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil*, Rajawali Pers, Depok.
-, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembokaran*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Kamis, Margarito, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Setera Pers, Malang.
- Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, terj. Nurulita Yusron, Nusa Media, Bandung.
- Kelsen, Hans 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Massachussettes
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2019, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Cet. IX, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harjanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2014, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.



- MD, Mahfud, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2021, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, Rajawali Pers, Depok.
-, 2017, *Lembaga Negara Indepenen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Natabaya, H.A.S, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Studi Kasus Sosio-legal Atas Konstituante 1955-1959*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
-, 2009, *Implikasi Amendemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1977, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakjat.
- Sartori, Giovanni, *Comparative Constitutional Engineering; An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes* .
- Sumardjono, Maria SW, 2019, “Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)”, UGM Yogyakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2013, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.



- Soehino, 2005, *Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Strauss, David A., 2010, *The living Constitution*, Oxford University Press, Oxford ; New York.
- Strong, C.F, 2014, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, terj. Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujinya*, Thafa Media, Srandakan, Bantul, Yogyakarta.
- Umam, Khairul, 2016, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Okaryal, Agil, dkk, 2020, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Wade, E.C.S dan Godfrey Phillips, 1960, *Constitutional Law*, Green And Co LTD, London.
- Wheare, K.C., 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cet. I, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Yusuf, Slamet Effendy dan Umar Basalim, 2000, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

Disertasi, Jurnal, Hasil Penelitian, dan Naskah Akademik

- Ali, Mahrus, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- AS, Andi Irmanputra, *Studi Hukum Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut atas Dasar Hukum yang Berlaku Surut Menurut Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2007.
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Penguatan dalam Kurun Waktu Pelita*

- I – Pelita IV, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1990.
- Baker, Thomas E., “Constitutional Theory in a Nutshell”, *William & Mary Bill of Rights Journal*, No. I, Vol. XIII, 2004.
- Berger, Raoul, “Originalist Theories of Constitutional Interpretation”, *Cornell Law Review*, Vol 73, No. 2, January 1998.
- Berman, Mitchell, “Constitutional Interpretation: Non-originalism”, *Philosophy Compass*, 2011.
- Chen, Albert H Y, “The Intepretation of the Basic Law – Common Law and Mindland Chinese Perspective”, *Hongkong L.J.* Vol. 30, 2000.
- Chaidir, Ellydar, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2005.
- Dewey, Donald O., “James Madison’s Public as Intepreter of the Constitution”, Oktober 1986.
- Dippel, Horst, “Modern Constitutionalism, An Introduction to A History in Need of Writing”, *Legal History Review*, 73 (1).
- Fahmi, Khairul, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil Dan Berintegritas, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2019.
- Nurbaningsih, Enny, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015.
- Ghoffer, Abdul, “Probematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konsitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018.
- Kirk, Jeremy, “Constitutional Intepretation and a Theory of Evolutionary Orginalism”, *Federal Law Review*, Vol. 27, 1999.



- Hamzah, Herdianysah, “The Constitutional Interpretation on the Natural Resources: Originalist Vs Non Originalist Interpretation”, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, No. 3, Desember 2019.
- Hasani, Ismail, Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2019.
- Huda, Ni'matul, “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8. No. 18, Oktober 2001.
- Lermack, Paul, “The Constitution is the Social Contract so it Must Be a Contract. . . Right? A Critique of Orginalism as Intepretive Method”, *William Mitchell Law Review*, Vol. 33, No. 4, 2007.
- Limbach, Jutta, “The Concept of the Supremacy of the Constitution”, *The Modern Law Review*, No. I, Vol. 64, Januari 2001.
- Isra, Saldi, dkk, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Laporan Penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Isra, Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, November 2014.
-, “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. I, Juni 2009.
-, “Hubungan Presiden dan DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, September 2013.
- Kurnia, Titon Slamet, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.
- Marzuki, Laica, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, Agustus 2011.
- Murphy, Walter F., “Who Shall Interpret? The Quest for the Ultimate Constitutional Interpreter”, *The Review of Politics*, Vol. 48, No. 3, 1986.



- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Nelson, Caleb, "What is Textualism?", *Virginia Law Review*, Vol 91, No. 2, April 2005.
- Petterson, Dennis, "Interpretation in Law", *San Diego Law Review*, Vol. 42, 2005.
- Palguna I Dewa Gede, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10, No. 3, September 2021.
- Manullang, E Ferndando M., "Sesat Fikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, April-Juni, 2018.
- Mainwaring, Scott, "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination" *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, 1993.
- Mochtar, Zainal Arifin, "Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 3, Desember 2015.
- Nazriyah, Riri, "Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010.
- Novavah, Muhammad Hendrik, "Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara", *Jurnal Rechtenstudent*, Vol. 1, No. 1, April.
- Ridlwani, Zulakarnain, Penataan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2019.
- Safaat, Muchamad Ali, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.
- Steilen, Matthew, "Reason, The Common Law, and The Living Constitution," *Legal Theory*, Vol. 17, No. 4, Desember, 2011.
- Santoso, Amir, "Peranan DPR dalam Menegakkan Konstitusionalisme, dalam Benny K. Harman dan Hendaridi, 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.



- Susanto, Mei, dkk, “Pergeseran Semu Fungsi Pembentukan Undang-Undang Pada Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Majelis*, Edisi 7, Juli 2018.
- S, Maria Farida Indarti, 2019, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Solum, Lawrence B., “What is Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory”, 2011.
- P, Sri Hastuti, *Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2020.
- Prabandai, Hendra Wahanu, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Prasasti, Erika Sita, “Partai Politik dan Koalisi: Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sejahtera dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Omara, Andy, dkk, “Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2021.
- Ridlawaan, Zulkarnain, *Penataan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintahan dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2019.
- Scheppele, Kim Lane, “Autocratic Legalism”, *The University of Chicago Law Review*, 2018.
- Yani, Ahmad, “Analisis Konstruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni 2018.
- Zachawerus, Frangky Alexander Hendra, *Pengujian Formil Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2020.



Risalah-Risalah Sidang

Indonesia (ed.), 2010, *Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia (ed.), 2010, *Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV*, Jilid II Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, Jakarta.

Risalah Rapat Dengan Pendapat Umum Dengan Pakar Mencari Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU TNI.

Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menko Polkam, Panglima TNI, dan Sekjen Dephan dalam rangka pembahasan RUU tentang TNI.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai RUU tentang Pemilihan Umum.

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden tahun 2003.

Risalah Rapat Pansus RUU Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

US Constitution

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Internet

Yuliandri, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Makalah Pusdik MKRI, Jakarta.

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf

I Dewa Gede Palguna, “Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi, Makalah seminar di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Agustus 2019. https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/PENEMUAN-HUKUM-DAN-PENGGUNAAN-YURISPRUDENSI-I-D.G.-Palguna-_SLEEI_FH-UGM.pdf

https://constitution.org/1-Constitution/cmt/belz/lcfl_10.htm, diakses 01 Desember 2021.

Ian Bartrum, “The Modalities of Constitutional Argument: A Primer,
<https://www.law.uh.edu/faculty/eberman/conlaw/Bartram.pdf>, diakses 9 Agustus 2021.

<http://partai.info/pemilu2009/>, diakses 13 November 2021

http://webarchive.loc.gov/all/20131225095757/http%3A//mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/pilpres2009/rekapitulasi_nasional.pdf diakses 23 Juni 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/19565481/kubu-jokowi-bernama-koalisi-indonesia-kerja>, diakses 20 November 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>, diakses 20 November 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/19461631/menakar-kekuatan-politik-partai-koalisi-pemerintah-di-tengah-menguatnya?page=all>, diakses 20 November 2021

<https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan>, diakses 20 November 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara-lt55f97e4ed1e36>, diakses 22 Januari 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat>, diakses 22 Januari 2022